

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS



SMA NEGERI 22 SURABAYA

Identitas Siswa:

Nama :

Kelas :

No.Absen :

Petunjuk mengerjakan LKPD Digital

No	Pembahasan	Laman	Keterangan
1	Data Peserta Didik	1	Isi dengan benar
2	Petunjuk mengerjakan LKPD	2	Baca dan ikuti
3	Naskah Materi	3-4	Baca dengan teliti
4	Soal Jawaban Singkat	4-6	Klik lalu ketik
5	Soal Pilihan Ganda	6-7	Cukup dengan klik
6	Soal Menjodohkan (Joint with Arrow)	8	Dengan menarik garis (gb pensil) dari jawaban ke soal
7	Soal Drag and drop	9	Klik lalu pilih

Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

KEGIATAN PRA PEMBELAJARAN

KD 3.7 Menganalisis perpajakan dalam Pembangunan ekonomi

Materi : PPH pasal 21 dan PBB

Kelompok :....

Anggota:

1.
2.
3.
4.

A. Tujuan :

Setelah melakukan proses pembelajaran melalui pengamatan terhadap video pembelajaran siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian pph pasal 21 dan pbb
2. Menjelaskan obyek pph dan pbb
3. Mengidentifikasi subyek pph
4. Menentukan dasar pengenaan pajak pbb
5. Melakukan perhitungan besar pph yang haru dibayar
6. Melakukan perhitungan besar pbb yang haru dibayar

1. Landasan Teori:

Menurut obyek pajak, pajak terdiri dari PPn, PPnBm, PBB, PPh, pajak bea materai dan BPHTB.

PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan. Sedang PBB adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena memperoleh manfaat hak atas tanah dan bangunannya.

Kali ini kita akan mencoba mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara menghitung PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap tahunnya.

2. ALAT/BAHAN:

Transaksi dalam perpajakan

3. PETUNJUK:

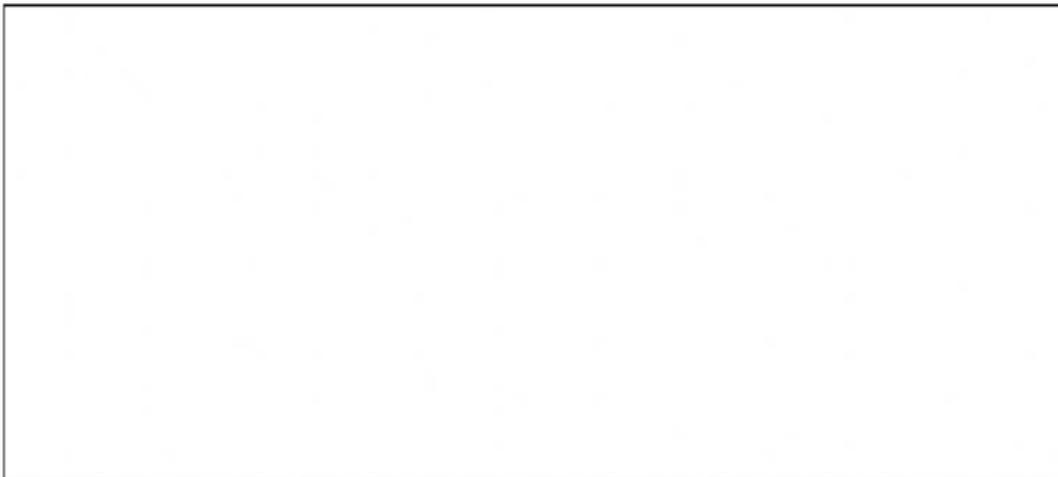
1. Baca dan pahami materi PPH pasal 21 dan PBB !
2. Tonton video sampai selesai
3. Siapkan pencatatan transaksi perpajakan yang diperlukan !
4. Hitung besar PPH pasal 21 dan PBB yang harus dibayar !

Bacalah materi berikut dengan baik

**MENGANALISIS PERPAJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
(Pajak Penghasilan Pasal 21 & Pajak Bumi Bangunan)**

Setelah kalian mempelajari pendahuluan pada bab perpajakan, maka untuk lebih memahami obyek pajak yang berupa penghasilan dan obyek pajak bumi dan bangunan, maka ikuti langkah yang ada Selengkapnya kamu bisa baca melalui **link berikut**

Untuk lebih jelasnya kamu bisa **melihat video youtube** tentang Pajak Penghasilan(PPH) & Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berikut ini



Setelah Memahami bacaan dan video yang ada silahkan isi pertanyaan berikut :

1. Pajak penghasilan dikategorikan menjadi PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas perusahaan yang biasanya dikenal dengan istilah PPh (isi dengan huruf)
2. Untuk sistem pengenaan tarif pajak PPh yang menentukan besarnya tarif pajak mengikuti besarnya penghasilan subyek pajak, sehingga semakin tinggi penghasilan subyek pajak semakin tinggi pajak penghasilan yang harus dibayar dinamakan tarif pajak(proporsional/progresif)
3. Pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh manfaat hak atas tanah dan bangunannya dinamakan dengan(isi dengan huruf)
4. Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Kebun merupakan salah satu obyek PBB yang berupa (bumi/bangunan)

Soal Seputar Perhitungan PPH pasal 21 dan PBB

Kasus Pehitungan PPH pasal 21

1. Siska pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 500.000,00.

Siska menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Siska dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.

Diminta :

- A) Besar penghasilan netto sebulan dari Siska
- B) Hitung penghasilan netto setahun dari Siska
- C) Tentukan besar PTKP Siska
- D) Tentukan besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) Siska setahun
- E) Hitung besar PPh Pasal 21 yang harus dibayar Siska bulan Januari

Penyelesaian:

Gaji sebulan Rp

Dikurangi:

Biaya Jabatan = Rp

Iuran Pensiun = Rp +

Rp -

Penghasilan netto sebulan (A) Rp

Penghasilan netto setahun (B) = Rp

Besar PTKP setahun

- WP sendiri = Rp

- Kawin = Rp

Jumlah PTKP setahun (C) = Rp -

PKP setahun (D) = Rp

PPH Pasal 21 terutang= % x Rp = Rp

PPH Pasal 21 bulan Januari (E) Rp : 12 = Rp

2. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin?

Jawaban:

1. Hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya:

Bangunan= x Rp = Rp

Tanah= x Rp = Rp +

NJOP = Rp

2. NJOP = Rp
NJOPTKP = Rp -
NJKP = Rp
NJKP =% x Rp = Rp
3. PBB =% x Rp = Rp

Soal Pilihan Ganda “Multiple Choice”

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara menekan jawaban yang paling benar

1. Setiap subyek pajak wajib memiliki NPWP. Tujuan dari digunakannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah
 - a. Memenuhi kewajiban perpajakan
 - b. Nomor tunggu dalam membayar pajak
 - c. Memperoleh keringanan dalam membayar pajak
 - d. Memenuhi syarat administrasi pendaftaran wajib pajak
 - e. Memenuhi penerimaan subsidi dari pajak
2. Pada tahun pajak 2018, PT Merpati memiliki penghasilan bruto Rp 62.500.000.000,00 dengan biaya pengurang penghasilan yang diizinkan adalah Rp 10.500.000.000,00. Besarnya pajak penghasilan terutang untuk tahun 2011 adalah
 - a. Rp 10.000.000.000,00
 - b. Rp 11.000.000.000,00
 - c. Rp 12.000.000.000,00
 - d. Rp 13.000.000.000,00
 - e. Rp 14.000.000.000,00
3. Berikut yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito Penghasilan berupa hadiah undian
 - b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya modal ventura
 - c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
 - d. Penghasilan berupa hadiah undian
 - e. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
4. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP Bangunan adalah
 - a. Bahan yang digunakan dalam bangunan
 - b. Rekayasa
 - c. Letak
 - d. Pemanfaatan
 - e. Kondisi lingkungan

5. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum. Berikut yang tidak termasuk dalam obyek pajak tersebut adalah
- Perwakilan diplomatik
 - Peninggalan purbakala
 - Tempat Pariwisata
 - Hutan wisata
 - Tempat Ibadah

Soal menarik garis “joint with arrow”

Silahkan tarik garis dari lajur kanan (buku besar yang digunakan untuk mencatat) ke lajur kiri sehingga menjadi jawaban yang benar

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun

Subjek Pemotong PPh 21

Jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak

batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak

Assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)

Obyek pajak (Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta)

Perusahaan / pemberi kerja

NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)

Contoh soal menyusun kalimat yang benar “Drag and Drop”

Silahkan isi bagian yang kosong dengan mendrag kata-kata dibawah ke tempat yang benar sehingga menjadi bagian dari PPH Pasal 21 dan PBB

PPH Pasal 21 DAN PBB

Pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri dinamakan

Sedang orang yang harus membayar pajak penghasilan disebut dengan istilah dan sudah mendaftarkan diri di

merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Bagian dari NJOP yang tidak kena pajak dikenal dengan nama

PPH

NJOPTKP

PBB

Wajib pajak

KPP

Dengarkan suara berikut dan tulis judul lagu / jawabannya di kolom sebelahnya



Jika sudah selesai anda bisa klik **FINISH & PILIH via email agar nilai anda bisa di cek oleh guru**

Cara Lengkap Mengedit LKPD Digital dengan Livesworksheet sampai share ke siswa